

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT PRIBUMI DAN NONPRIBUMI DALAM TETRALOGI PULAU BURU

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum kehidupan pribumi dan pola hidup masyarakat Eropa dalam karya Buru. Pramoedya menggambarkan adanya ketimpangan sosial antara kehidupan masyarakat pribumi dibanding dengan masyarakat Eropa, yang disesuaikan dengan latar waktu dalam cerita. Pada awal abad 19, di semua tanah jajahan, khususnya di Indonesia, antara Pribumi dan Eropa terdapat perbedaan yang menyolok dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemampuan secara ekonomi, sosial, maupun pola berpikir antara masyarakat pribumi yang berbeda dengan pola pikir orang-orang Eropa yang ada di Indonesia pada waktu itu.

Masyarakat Indonesia pada masa itu masih jauh dari apa yang dikenal dengan modernisasi. Pola pikir masyarakat masih kuno, tradisional, bahkan beberapa bagian wilayah Indonesia masih jauh dari peradaban. Hindia jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain di dunia, terutama Eropa. Pada masa itu digambarkan bahwa Eropa sedang mengalami modernisasi besar-besaran. Beberapa macam temuan mewarnai kemajuan bangsa kulit putih. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, alat-alat penting diciptakan, temuan-temuan di bidang sains, membuat Eropa lebih maju dibanding bangsa lainnya. Semua temuan itu bertujuan untuk memudahkan manusia. Alat-alat modern bertenaga mesin diciptakan, mulai dari penemuan listrik, bola lampu, kereta api, tenaga uap,

alat cetak, bahkan gambar manusia pada masa itu telah dapat diperbanyak dengan alat yang disebut zincografi. Tenaga-tenaga alam diubah untuk kebutuhan hidup manusia. Manusia tidak perlu lagi berjalan kaki ribuan mil, tidak perlu lagi menunggu salju turun hanya untuk menikmati es. Semuanya dapat mereka ciptakan sendiri.

Sebaliknya, masyarakat Hindia masih terikat pada pola pikir yang masih kuno. Angka-angka, hari-hari bahkan jam, sukukata nama orang, tahun dan bulan kelahiran, serta arah mata angin, diberi nilai, dikombinasikan dan dihitung, untuk meramalkan yang akan terjadi dan menahan yang tidak boleh terjadi. Mereka masih percaya pada kekuatan alam yang diyakini sebagai penjelmaan leluhur. Masyarakat Hindia terlalu sederhana. Kemudahan hidup yang didapat dari lingkungan sekitar tempat tinggal membuat mereka terlena. Berbeda dengan kondisi alam negeri Eropa yang menuntut untuk selalu bertahan hidup. Semangat untuk bertahan yang membuat orang Eropa terus belajar dan mencari.

Antara pandangan dunia pribumi dengan Eropa ada perbedaan dasar yang tak terjembatani, seperti yang terdapat dalam buku keempat. Eropa memandang alam sebagai sesuatu yang harus ditaklukkannya. Pribumi memandang dirinya sebagai bagian dari alam. Perbedaan pandangan ini menjadi sumber dari segala tingkah laku mereka, dan pada sumber itu pula perbedaan dapat ditemukan kembali. Eropa hendak menaklukkan alam. Pribumi hendak menyesuaikan diri sehingga menjadi satu keserasian dengan alam (Toer, 2001: 237).

Menurut Helen Carr, dalam kolonialisme, orang-orang non-Eropa dilihat sebagai bagian dari alam, bukan budaya, siap untuk diperintah, pasif, kekanak-

kanakan, bodoh, harus dipimpin dan dibimbing, tidak memiliki kekuatan intelektual, tidak tahan uji, cabul, memikirkan nafsu sendiri (1985:50). Munculnya hubungan penjajah dan yang terjajah berdasarkan penarikan sifat-sifat pribumi yang inferior dibandingkan orang-orang kulit putih yang telah mengenal baik watak pribumi, sehingga merasa perlu mengadabkan sifat rendah pribumi tersebut. Pribumi dikatakan hanya mengenal nafsu badani, tidak menggunakan akal pikirannya, seperti pada kutipan dalam *Jejak Langkah* berikut,

“...Mereka korup sudah sejak dunia pikirannya, dari dukun sampai pedagangnya, dari petani sampai rajanya. Mereka tidak mengerti nilai uang. Mereka hanya tahu nilai hawa nafsunya sendiri. Hanya kekuasaan Hindia Belanda dapat mendidik mereka. Hanya Kompeni mengerti watak mereka” (Toer, 2001: 252).

Sejak semula orang Eropa mendarat di Hindia, Hindia telah jauh ketinggalan dibandingkan Eropa. Menurut orang-orang Eropa tidak benar Jawa dan Hindia dikuasai Eropa semata-mata karena kerakusan. Semua disebabkan kesalahan pandangan Jawa dan Hindia sendiri dalam melihat dunia. Hindia digambarkan sebagai negeri yang hanya dapat menunggu-nunggu hasil Eropa. Pribumi Hindia dipaksa mengakui keunggulan Eropa, juga dipaksa selalu merasa rendah diri. Eropa mentertawakan penguasa-penguasa pribumi yang menggunakan tahyul untuk menguasai rakyatnya sendiri, seperti mitos Nyai Roro Kidul yang dianggap merupakan kreasi Jawa untuk mempertahankan kepentingan raja-raja pribumi. Eropa juga mempercayai tahyul, bukan tentang kekuatan gaib atau mitos, melainkan tahyul tentang hebatnya ilmu pengetahuan. Pribumi dibuat melihat wajah Eropa yang baik untuk menutupi topeng keburukannya. ...dalam

masa hidup kita sekarang seluruh Hindia percaya pada keagungan, kewibawaan, kebijaksanaan, keadilan, dan kemurahan Gubernur (Toer, 2001:246).

Kondisi inilah yang melatarbelakangi orang-orang Belanda untuk mengadu nasib di Hindia Belanda. Mulanya mereka datang sebagai petualang, karena banyak diantara mereka adalah orang-orang putus-asa, atau bandit-bandit pelarian, atau orang yang lari dari tagihan hutang, atau bangkrut karena perjudian dan spekulasi. Mereka pergi dari negeri asalnya untuk mencoba peruntungan di negeri lain. Melihat kondisi Hindia yang subur, banyak terdapat kekayaan alam yang belum tergali, memunculkan niat untuk menguasai Hindia. Orang-orang Eropa mengenal Pribumi dengan sangat baik, kemudian memunculkan definisi tentang orang "Timur", yaitu orang-orang Asia, menurut sudut pandang orang-orang Barat. Pribumi Hindia dinilai sebagai orang "Timur" yang jauh tertinggal dari Eropa, sehingga dibutuhkan seorang "dewa" yang dapat membantu memodernkan mereka. Nafsu menguasai muncul dan selamanya sifat kolonial tidak pernah hilang. Kolonialisme tidak dapat lepas dari sifat kolonial dan juga kekuatan senjata. Seorang kolonis tidak dapat menguasai tanpa senjata, demikian pula adanya senjata tanpa kekuasaan kolonial, maka senjata itu hanya menjadi hiasan rumah, yang dapat diketahui dari kutipan buku ketiga berikut.

"Itu gunanya senjata dibikin, dibeli, dipergunakan."
Dan barangsiapa tak membikin, membeli, mempergunakan...sekaligus aku dapat mengerti: dia adalah sasaran (Toer, 2001:39).

...Tujuannya sama: perlombaan kolonial seluruh dunia demi kebesaran nasional bangsa-bangsa Eropa, kehebatan dalam merampas, dan merakus, menghisap kekayaan bumi dan manusianya (Toer, 2001:251).

Belanda mulai menguasai Hindia, dan dalam praktiknya menciptakan jurang perbedaan yang cukup besar antara Pribumi dan Penguasa. Perbedaan tersebut diperluas tidak hanya terhadap pribumi saja melainkan juga diberlakukan bagi semua bangsa kulit berwarna yang tinggal di Hindia (Arab, Jepang dan Tionghoa).

Kedatangan masyarakat Belanda ke Hindia Belanda dan menjadi penguasa ini menduduki posisi tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat Hindia Belanda, yang sebelumnya ditempati oleh para *priyayi* keluarga bangsawan. Perubahan stratifikasi sosial itu menjadi :

- a. Masyarakat Eropa Totok
- b. Masyarakat Eropa Peranakan
- c. Masyarakat Timur asing terdiri dari Cina, Arab dan peranakannya
- d. Masyarakat pribumi

Masyarakat Belanda dan Eropa lainnya menduduki titik puncak piramida stratifikasi sosial dalam struktur masyarakat kolonial di Hindia Belanda. Sebagai kaum elit mereka merupakan suatu komunitas yang terpisah dari warga masyarakat pribumi.

Secara yuridis formal, golongan Indo atau Peranakan termasuk dalam status golongan Eropa, akan tetapi kenyataannya golongan Belanda Totok tidak mau dipersamakan statusnya dengan golongan Indo (Riyanto,2000). Seorang Totok menolak disamakan dengan seorang Indo dengan anggapan bahwa seorang Indo atau Peranakan, dalam darahnya bercampur dengan darah pribumi yang rendah. Dalam segala hal, Indo Peranakan menempati posisi di bawah orang

Eropa Totok. Namun posisinya dalam struktur masyarakat, Indo setingkat diatas pribumi, sehingga kekejaman perlakuan baik Indo maupun Totok terhadap pribumi sama saja.

Orang-orang peranakan Eropa (Indo) tidak puas dengan perlakuan Eropa Totok yang memposisikan mereka di bawahnya. Golongan Indo merasa bahwa kekuasaan Eropa Totok atas pribumi tidak lepas dari peran mereka, bahkan lebih berpengaruh. Mereka merupakan jembatan penghubung antara Totok dengan pribumi, seperti pada kutipan berikut dalam buku *Jejak Langkah*.

“Tapi juga dalam hal-hal yang sangat penting golongan Indo berjasa sebagai perantara tanpa pamrih antara Eropa dan Pribumi Hindia. Barangkali di kemudian hari, kalau Hindia sudah semaju Eropa, orang akan mendirikan tugu peringatan untuk jasa golongan Indo sebagai perantara peradaban yang tidak pernah dibayar. Mungkin juga sebagai pengadab Pribumi itu sendiri.” (Toer, 2001:331)

Pribumi lebih mempercayai golongan Indo karena dalam darah golongan itu masih mengalir darah pribumi. Kedekatan inilah yang dimanfaatkan oleh golongan Indo untuk mendapatkan simpati dari Eropa Totok. Akan tetapi, kedudukan mereka tetap di bawah dan banyak dari golongan ini yang hidup miskin. Golongan Indo saling bekerjasama melalui produksi dan niaga, tidak menggantungkan diri pada jabatan Gubernur. Mereka belajar mandiri dengan memulai banyak hal yang kemudian dicontoh oleh pribumi, di antaranya adalah mendirikan bengkel, sekolah pendidikan teknik, rumah yatim, dan beberapa perusahaan ringan. Lambat laun kebanggaan itu hilang seiring dengan kemajuan yang didapatkan oleh pribumi. Semakin lama pribumi melakukan kontak dengan Eropa Totok, maka sedikit demi sedikit ilmunya akan bertambah, dan hal tersebut menjadikan golongan Indo terlupakan.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat kolonial didasarkan atas politik diskriminasi rasial. Politik diskriminasi rasial dipergunakan untuk menegaskan perbedaan kelas atau status sosial antara golongan penguasa dengan golongan yang dijajah. Perbedaan rasial yang sangat menyolok antara pribumi dengan orang Eropa adalah warna kulit dan agama, seperti pada kutipan berikut dalam buku *Bumi Manusia*.

“Biar pun Tuan kawini nyai, gundik ini, perkawinan syah, dia tetap bukan Kristen. Dia kafir! Sekiranya dia Kristen pun, Tuan tetap lebih busuk dari Mevrouw Amelia Mellema Hammers. Tuan telah lakukan dosa darah, pelanggaran darah! Mencampurkan darah Kristen Eropa dengan darah kafir Pribumi berwarna! Dosa tak terampuni!” (Toer, 2001:105).

Di zaman modern awal Eropa, agama Kristen dianggap sebagai prisma yang membiaskan semua pengetahuan tentang dunia (Miles,1989:16). Di Eropa, Kristen dikonstruksi berlawanan dengan Islam. Setiap identitas rasial selalu dikaitkan dengan kedua agama tersebut. Islam sebagai biner dari Kristen, dengan demikian agama yang satu mengkafirkan agama yang lain. Di negeri jajahan, terutama Hindia, pribumi yang beragama Islam dianggap sebagai kafir dari ajaran Kristen. Begitu pula sebaliknya, bagi Pribumi muslim, penganut agama Kristen adalah kafir dari ajaran Islam.

Columbus membedakan antara orang-orang kulit berwarna yang dianggap inferior dibandingkan dengan orang kulit putih. Dalam beberapa kasus, warna adalah penanda paling penting untuk perbedaan kultural dan rasial. Warna kulit mempengaruhi perlakuan orang-orang Eropa terhadap pribumi. Segala bentuk masalah yang terjadi selalu diselesaikan secara tidak adil hanya karena warna kulit

yang berbeda. Selamanya bangsa kulit putih merasa paling unggul dan harus selalu menang.

Bangsa kulit putih selalu menganggap bangsa kulit berwarna lebih rendah dari mereka. Mereka yakin ras kulit putih unggul secara fisik, mulai dari warna kulit yang terang, hidung mancung, tinggi, berbadan besar dan tegap. Sebaliknya, ras berwarna berkulit coklat dan hitam, hidung pesek, pendek, berbadan kecil. Bentuk tubuh mengisyaratkan kemajuan pikiran dan kekuatan fisik. "Titik bakar berpindah pada perbedaan kulit: Eropa kontra Pribumi" (Toer, 2001:312). Pernyataan rasial tersebut terdapat pada buku *Bumi Manusia*.

Berbeda halnya jika seorang pribumi berkulit putih dan beragama Kristen, akan mendapat perlakuan sedikit lebih baik. Seperti pada orang-orang Manado yang umumnya berkulit putih dan beragama Kristen. Mereka masih diberi kedudukan didalam pemerintahan kolonial. Banyak diantara mereka yang menjadi polisi, pegawai pemerintahan, bahkan jika memiliki prestasi dan loyalitas yang cukup baik pada Gubernur, akan mendapat pangkat dan gelar tertinggi dari Gubernur.

Adanya tingkatan sosial dalam masyarakat kolonial, melahirkan adanya diskriminasi atau ketidakadilan-ketidakadilan yang dialami oleh Pribumi. Ketidakadilan-ketidakadilan tersebut meliputi semua aspek kehidupan, yaitu sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan hukum.

2.1 Ketidakadilan Sosial

Sejak kedatangan Belanda ke Hindia, seluruh tatanan sosial kemasyarakatan mengalami perubahan total. Akibat stratifikasi sosial yang diciptakan oleh kolonial, pribumi menempati kedudukan paling rendah yang berarti golongan di atasnya berhak melakukan tindak kesewenang-wenangan. Dalam struktur masyarakat pribumi sendiri masih terdapat lapisan-lapisan yang mendudukkan petani dan rakyat kecil lainnya sebagai unsur paling bawah. Pribumi rendah, yaitu golongan rakyat kecil mengalami beban penindasan ganda. Rakyat kecil mengalami penindasan dari para pembesar pribumi, sekaligus dari pemerintah kolonial. Para raja dan bupati pribumi semuanya gila kebesaran. Pribumi rendah harus membungkuk dan merangkak di hadapan mereka. Sebelum kedatangan orang-orang kulit putih, raja-raja pribumi mengerahkan setiap prajurit untuk saling memusnahkan, berebut keunggulan, saling menaklukkan tanpa melihat orang-orang tidak berdosa yang menjadi korban kekuasaan. Maka lengkaplah penderitaan yang dialami oleh rakyat jelata.

Perubahan sosial yang paling kentara sejak pendudukan Belanda adalah munculnya pranata “nyai” dalam masyarakat pribumi. Sebelumnya, istilah “nyai” dijumpai di lingkungan keraton, atau pembesar-pembesar pribumi dengan istilah yang lebih halus yaitu “selir” raja. Kebiasaan seorang raja memiliki istri lebih dari satu dipandang sebagai hal yang wajar karena kekuatan raja selain dilihat dari kemampuannya dalam memimpin rakyat, juga dilihat dari berapa banyaknya selir yang dimiliki. Masyarakat Jawa yakin bahwa wanita adalah simbol kekuatan dan

kejantanan dari laki-laki. Maka tidak heran jika masyarakat melegalkan kebiasaan tersebut.

Belanda datang ke Hindia tidak dalam jumlah besar. Mereka terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang selanjutnya membentuk koloni-koloni dengan sebangsa mereka. Keberhasilan menguasai Hindia tidak membuat mereka kemudian memboyong keluarganya untuk menetap di Hindia. Mereka berpisah dari keluarga yang tetap tinggal di negara asal. Faktor kesepian dan untuk mencari kesenangan membuat laki-laki Belanda melakukan pergundikan. Perempuan pribumi yang telah masuk masa kawin diambil paksa dari orang tuanya untuk menjadi gundik, hidup serumah layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan. "Simpanan" Belanda inilah yang kemudian dipanggil Nyai, yang secara sosial dipandang sebagai perempuan rendah, tidak bermoral, seperti pada kutipan berikut dalam *Bumi Manusia*.

...begitulah tingkat susila keluarga nyai-nyai: rendah, jorok, tanpa kebudayaan, perhatiannya hanya pada soal-soal berahi semata. Mereka hanya keluarga pelacur, manusia tanpa pribadi, dikodratkan akan tenggelam dalam ketiadaan tanpa bekas....Semua lapisan kehidupan menghukum keluarga nyai-nyai; juga semua bangsa: Pribumi, Eropa, Tionghoa, Arab...(Toer, 2001:50-51).

Seorang Nyai, tetaplh perempuan pribumi yang tidak berdaya, tidak kuasa atas dirinya sendiri. Mereka adalah perempuan-perempuan malang yang tidak pernah bermimpi untuk diperlakukan serendah itu. Setiap perempuan selalu memimpikan diperistri secara hormat, dinikahi sesuai hukum adat dan agama. Belanda telah merusak impian dan membuat mereka terbuang dari keluarga, juga dari masyarakatnya sendiri. Nasib sebagai bangsa jajahan yang membuat mereka pasrah pada hidup.

Perilaku pergundikan antara pribumi dan pembesar Eropa, melahirkan keturunan berdarah campuran yaitu Indo Peranakan. Secara hukum dan sosial, maka anak-anak tersebut harus menyandang nama bapaknya. Jika tidak, maka dianggap sebagai Indo hina yang tidak pernah diakui oleh ayahnya. Menurut agama, anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan disebut anak haram. Tetapi anak hasil pergundikan, meskipun tanpa adanya pernikahan, tetap diakui sah apabila terdapat nama bapaknya di belakang nama aslinya. Adanya nama keturunan inilah yang turut mempengaruhi pribumi. Dalam *Bumi Manusia*, dijelaskan bahwa keturunan pembesar-pembesar pribumi selalu dilekati dengan nama ayahnya untuk memperjelas status mereka dalam masyarakat. Seseorang tanpa nama keluarga maka dianggap sama dengan pribumi rendah umumnya (Toer, 2001:13).

Diskriminasi sosial dalam kehidupan sehari-hari tampak dalam tata cara berpakaian. Pakaian merupakan salah satu identitas yang membedakan antara Pribumi dan orang-orang Eropa. Golongan Belanda pada masa itu mengenakan busana modern barat, seperti *pantaloon*, *jas* dan *kemeja*. Pribumi diwajibkan mengenakan pakaian kebesarannya sesuai dengan etnis masing-masing dan tingkat sosialnya dalam masyarakat. Pembesar Jawa mengenakan destar, kain batik, *blangkon*, dan *berselop*. Rakyat kecil dari golongan petani menggunakan pakaian dari kain *drill* warna hitam dengan celana di bawah lutut. Etnis Madura juga mengenakan baju hitam dan kaus loreng, serta clurit yang menjadi senjata tradisional etnis Madura. Sekalipun golongan terpelajar pribumi diberi kesempatan bersekolah pada sekolah-sekolah Belanda, namun untuk membedakan

dengan Eropa Totok dan Indo, diwajibkan mengenakan *destar* dan kain batik yang menjadi ciri Pribumi.

Perbedaan status sosial juga tampak dalam pembagian alat transportasi. Gerbong-gerbong dalam kereta api dibagi-bagi sesuai dengan tingkat sosial seseorang dalam masyarakat. Gerbong klas satu dan dua hanya satu gerbong khusus untuk penumpang Totok, Indo, dan pembesar pribumi. Umumnya penumpang selalu bersepatu atau berselop. Gerbong klas dua untuk warga Asing (Cina, Arab) atau kalangan pedagang Pribumi yang secara ekonomi lebih mampu dibanding lainnya. Mereka berselop atau bersandal, tanpa sepatu. Gerbong klas tiga untuk pribumi yang cakar ayam, pedagang-pedagang pasar sehingga segala bau pasar ikut serta, termasuk juga lalat.

Pembatasan dan pembedaan secara rasial sampai pada pembatasan kontak sosial serta lokasi pemukiman dari masing-masing komunitas rasial. Tidak terjadinya kontak fisik antara kulit putih dan kaum pribumi terjadi sangat menyolok. Politik apartheid yang diterapkan pemerintah kolonial melarang dengan tegas orang-orang pribumi memasuki perkumpulan-perkumpulan warga Belanda, lapangan olah raga, juga sekolah-sekolah khusus bagi warga kulit putih, terkecuali bagi keturunan bangsawan pribumi.

Bangsa Asing (Arab, Cina, Jepang) ditempatkan sama seperti pribumi hanya karena perbedaan warna kulit. Meskipun beberapa diantaranya berkulit putih, selamanya bangsa-bangsa—secara geografis berada di belahan bumi Timur—dianggap sebagai bangsa kulit berwarna. Mereka juga mengalami diskriminasi. Tempat tinggal mereka dipisahkan. Mereka menempati daerah-

daerah (pemukiman) khusus yang sudah ditunjuk oleh Gubernur. Mereka dikucilkan dari pergaulan luas, serta selalu diawasi gerak-geriknya. Segala bentuk komunikasi dengan pribumi maupun orang Eropa, tidak diperbolehkan. Etnis Tionghoa tidak diperkenankan menduduki posisi dalam pemerintahan, sehingga sebagian besar dari mereka adalah pedagang, pemilik rumah-rumah plesiran.

Pengakuan Internasional atas Jepang yang didudukkan sederajat dengan bangsa Eropa mengundang banyak kritikan dari orang-orang Eropa, seperti tampak pada kutipan berikut dalam *Anak Semua Bangsa*.

...bagaimana jadinya dunia ini kalau bangsa Eropa harus duduk sederajat dengan bangsa kulit berwarna, yang memang sama sekali belum patut duduk sama tinggi dengan kita? Duduk sama tinggi? Kira-kira memang bisa terjadi. Berdiri sama tinggi? Nééééé!....(Toer, 2001:46).

Orang-orang Eropa merasa tersaingi sebagai ras yang paling unggul dan mengkhawatirkan kedudukan mereka sebagai penguasa negeri jajahan. Untuk itu, mereka berupaya agar bangsa Cina tidak turut diakui pula menjadi sederajat dengan mereka orang-orang Eropa. Bangsa kulit putih merasa terhina jika disamakan dengan bangsa kulit berwarna.

2.2 Ketidakadilan Ekonomi

Superioritas orang kulit putih, seorang kolonis, menjadikan pribumi selamanya harus menjadi pekerja murah dan budak. Bagi pejabat-pejabat Gubernur, kedudukan sebagai penguasa secara langsung memiliki hak-hak luar biasa (hak *exorbitant*), yang membuat mereka dapat melakukan tindakan sewenang-wenang berdasarkan hukum yang mereka buat sendiri. Mula-mula

orang-orang pribumi dirampas dari tanah-tanah mereka yang terbaik, dan dipindahkan ke penampungan-penampungan didekatnya. Tanah yang dianggap tidak dikerjakan oleh pribumi dianggap sebagai tanah “terbuang” oleh kaum penguasa. Setelah memperoleh tanah, para kolonis perlu memperoleh tenaga. Mereka menugaskan pada pembesar pribumi untuk memasok tenaga kerja untuk membangun jalan, dan bertindak sebagai pengangkut barang, jauh dari tempat tinggal mereka. Upah yang diberikan rendah, dan menolak bekerja akan dihukum keras. Pribumi diperbolehkan menempati tanah dengan bayaran sejumlah kerja atau panen yang dihasilkan, dengan kata lain mereka diwajibkan membayar pajak atas tanah mereka sendiri. Tindakan-tindakan demikian mendapat dukungan dari pembesar pribumi dengan alasan bahwa hal itu akan mengurangi kemalasan dan kejahatan di kalangan penduduk lokal, seperti pada kutipan berikut dalam *Anak Semua Bangsa*.

Di beberapa tempat, bila kereta sedang berjalan lambat, nampak serombongan rodi sedang memperbaiki jalan kereta api dan seorang peranakan Eropa duduk di atas kuda, berpedang, mengawasi mereka bekerja. Rodi dikerahkan oleh Pangreh Praja dan Kepala Desa, dan Kepala Desa mengerahkan para petani yang mengusahakan tanah milik Gubernur. Mereka tak dibayar untuk kerja rodi. Juga tak mendapat makan atau uang jalan. Bahkan minum pun mereka harus berusaha sendiri (Toer, 2001:127).

Rodi adalah sistem kerja kolektif tradisional yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Pribumi. Definisi tersebut menurut pejabat Gubernur, yang kenyataannya jauh berbeda. Kerja kolektif berubah menjadi kerja paksa. Keuntungan bukan untuk rakyat melainkan dipergunakan untuk mengisi kekosongan kas kerajaan Belanda. Diantara mereka yang harus melakukan rodi, tidak sedikit yang memiliki keahlian

yang belum tentu dimiliki oleh mandornya. Paling tidak mereka adalah petani-petani mahir. Buruknya nasib hanya karena sebagai penduduk desa di Hindia mereka tidak berhak memiliki tanah sendiri. Selain terkena rodi, mereka masih dikenakan jaga dan ronda malam, gugur gunung bila terjadi garapan mendadak untuk kepentingan umum. Mereka tetap diwajibkan membayar upeti untuk pembesar-pembesarnya, seperti pada kutipan berikut dalam *Anak Semua Bangsa*.

Semua kehidupan kerajaan dan kolonial mengapung di atasnya. Setiap kaki boleh menginjak bahu dan kepalanya, seperti yang dilakukan oleh Daendels, dan mereka akan menampung setiap beban tanpa protes. Mereka takkan mengaduh, karena berabad lamanya mereka mengenal satu macam nasib: nasib petani. (Toer, 2001:128).

Kemiskinan yang diderita oleh para petani, dan pribumi umumnya, tidak lain akibat ulah pemerintah Gubernur dibantu pembesar-pembesar Pribumi yang haus pangkat dan kekayaan. Mereka melakukan kecurangan-kecurangan dalam hal sewa tanah. Para petani dipaksa untuk menyewakan sawah dan ladang mereka kepada Gubernur dengan ongkos sewa yang telah ditentukan. Namun, jumlah uang yang di terima setiap bulan untuk tanah mereka tidak sesuai dengan hitungan. Lama kelamaan, tanah sewaan itu diakui sebagai milik Gubernur dan mengusir pemiliknya. Sawah dan ladang yang tanahnya subur akan dikontrak untuk ditanami tanaman-tanaman yang menguntungkan bagi pihak Gubernur, seperti tebu atau palawija. Bagi petani yang menolak menyewakan tanahnya, setiap hari akan diteror oleh tukang pukul bayaran, diancam, disindir dan dimaki. Saluran irigasi akan ditutup yang pada akhirnya akan menyulitkan petani itu sendiri.

Menghadapi tuduhan telah merugikan para petani gula, pihak Gubernur memberikan sangkalan. Tidak pernah ada petani menjadi miskin karena menyewakan tanahnya pada pabrik. Mereka mendapatkan uang sewa layak. Mereka bisa hidup senang sebagai kuli pabrik. Di atas tanah sendiri yang disewakannya. Uang sewa yang dibayarkan pada petani selalu sesuai dan dengan harga yang pantas. Bahkan, hanya dengan menjadi kuli pabrik, upah yang diterima akan sama dengan menyewakan sawah sendiri. Jika dibandingkan mereka mengerjakan sendiri sawahnya, maka biaya produksi yang harus dikeluarkan lebih banyak, misal dengan membeli peralatan sawah yang harganya sangat mahal.

Harta benda dan kebahagiaan para petani kecil terampas habis oleh Tuan-tuan mereka. Petani dan keluarganya hidup serba kekurangan. Mereka harus berbagi makanan dengan saudara-saudara yang lain dalam kurun waktu tidak terbatas. Hari ini mereka dapat makan singkong, tapi harus berpuasa untuk tiga hari berikutnya. Sedikitpun mereka tidak protes dengan nasib yang mereka alami.

Kehidupan antar pribumi sendiri memperlihatkan jurang yang cukup besar antara pribumi kaya dan pribumi miskin. Bagi golongan pribumi yang secara materi berkecukupan, maka tidak memperoleh kesulitan dalam hal biaya hidup. Bahkan mereka mampu menikmati hasil bangsa modern yang mulai bermunculan di Hindia, seperti kereta api, dokar, sepeda, dan mobil. Pribumi kecil hanya bisa terheran-heran melihat produk jaman baru yang aneh bagi mereka. Sebagian lagi tidak mempedulikan, yang ada dalam pikiran mereka adalah kerja, kerja, dan kerja agar dapat bertahan hidup. Kemiskinan yang teramat sangat di kalangan pribumi

ditunjukkan dengan jelas dalam *Anak Semua Bangsa*, seperti pada kalimat berikut, “Para petani tak berbaju memerlukan berhenti di pinggir jalan hanya untuk melihat penumpang dokar. Anak-anak kecil telanjang bulat, badan kotor, hidung basah, jorok, bermain-main di pinggir jalan” (Toer, 2001:133).

Ketimpangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya akibat kebijaksanaan kolonial telah membuat rakyat Hindia miskin, banyak yang menderita busung lapar, penyakit kulit, saluran pernapasan, dan sebagainya. Kesulitan ekonomi membuat mereka tidak pernah mengenal nama dokter dan ilmu pengobatan. Setiap penyakit dianggap ringan sehingga tidak perlu berobat, kecuali saat tubuh mereka benar-benar tidak berdaya lagi. Tidak hanya secara fisik mereka sakit, tetapi sampai jiwa dan mental mereka mengalami penjajahan. Mereka tidak dapat menikmati hasil tanah warisan leluhur yang seharusnya menjadi hak mereka.

Perekonomian pribumi jauh dibawah orang-orang Eropa Totok dan Indo, dan tetap di bawah bangsa Asia lainnya, yaitu Arab dan Tionghoa. Roda perekonomian, khususnya perdagangan dimonopoli oleh dua keturunan tersebut. Pribumi hanya unggul pada hasil pertanian, tetapi tetap saja yang mengatur penjualan adalah para pemilik tanah. Bangsa Arab dan Tionghoa dikenal ulet dalam berdagang. Ciri khas mereka adalah bantu-membantu dengan sesamanya, membeli bahan tidak melalui tengkulak, melainkan langsung bertransaksi dengan pedagang besar sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Berbeda dengan pedagang pribumi yang tidak mau saling bekerjasama dengan sesama pedagang pribumi lainnya. Satu dengan yang lain saling bersaing mengejar keuntungan dan

saling menjatuhkan. Kesulitan modal juga membuat mereka kesulitan mendatangkan bahan langsung dari produsen. Akibatnya satu-persatu pedagang pribumi jatuh bangkrut karena kalah bersaing dengan pedagang Arab dan Tionghoa. Pedagang pribumi harus mulai belajar pada orang-orang Arab dan Tionghoa tentang cara bekerjasama dengan pedagang sebangsanya untuk bersama-sama bangkit dari keterpurukan dan menjadi sukses secara merata.

2.3 Ketidakadilan Pendidikan

Bentuk- bentuk penjajahan di seluruh muka bumi memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula dengan dengan model-model penjajahan. Di beberapa negara jajahan, pemerintah yang berkuasa tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dari tanah jajahan. Ada diantaranya yang membuka hubungan baik dengan penduduk setempat sehingga memungkinkan pertemuan kultural secara harmonis. Bagi pribumi disediakan sekolah-sekolah yang dapat meningkatkan intelegensia pribumi.

Di Hindia, sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda khusus tempat belajar bagi pemuda-pemuda Totok dan Indo. Keturunan bangsawan pribumi mendapat perkecualian. Mereka diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan ala Barat yang disampaikan oleh pengajar-pengajar asing. Semua pelajaran yang diajarkan berisi keunggulan bangsa Eropa dibanding bangsa Asia, serta memuji-muji kebaikan penguasa kolonial yang dianggap berjasa bagi pribumi. Mereka selalu membanding-bandingkan hasil terpelajar Eropa yang telah melahirkan penemuan-penemuan penting, dan terpelajar pribumi

yang hanya menunggu kebaikan yang diberikan oleh Eropa (Toer, 2001:121-122). Pernyataan senada yang menunjukkan ketidakadilan Pemerintah Belanda terdapat pada *Anak Semua Bangsa*, seperti kutipan berikut.

Di setiap kabupaten, Gubernur hanya mendirikan satu Sekolah Dasar Umum dengan dua bagian. Angka Satu dan Angka Dua. Angka Satu mendapat sedikit pelajaran bahasa Belanda. Angka Dua sama sekali tidak. Gedungnya bertiang kayu dan berdinding bambu...Hanya anak-anak lulusan Angka Satu yang punya kemungkinan dapat membaca sedikit-sedikit Belanda. Yang lainnya dapat dikatakan buta sama sekali (Toer, 2001: 5).

Meskipun diberi kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu dengan para pemuda Eropa lainnya, perlakuan guru-guru Eropa terhadap murid pribumi tetap saja tidak adil. Dalam urutan tempat duduk, pribumi menempati bangku paling belakang. Hal yang sangat menyakitkan terjadi pada Minke yang harus duduk terpisah dari teman-teman lainnya hanya karena dianggap berbahaya dalam pergaulan. Dalam tetralogi diceritakan bahwa Minke terlibat hubungan dengan keluarga Nyai Ontosoroh. Menurut kepala sekolah, jika seorang siswa telah berani berhubungan cinta, dianggap sudah dewasa dan membahayakan teman-teman lainnya. Apalagi, cinta Minke pada keluarga yang dianggap asusila oleh masyarakat. Akibatnya Minke tidak dapat melanjutkan sekolah ke Nederland karena tidak memiliki budi pekerti yang baik. Penilaian budi pekerti baik harus disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan oleh Gubernur.

Seorang terpelajar pribumi juga dianggap berbahaya apabila sudah berani aktif dalam hal tulis-menulis di surat kabar, terutama jika tulisannya mengkritisi setiap bentuk kebijaksanaan pemerintah Belanda, sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Pemerintah khawatir akan mempengaruhi pikiran pelajar-pelajar yang

lain. Sekecil apapun aktivitas pribumi yang dianggap membahayakan kekuasaan kolonial di Hindia akan segera ditindak.

Kesempatan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Gubernur merupakan siasat penguasa agar tampak baik di hadapan rakyat jajahnya. Segala upaya dilakukan untuk menyamarkan kebusukan kolonial. Buku-buku, *literature-literature* yang diberikan terbatas pada segala hal yang berbau kebaikan. Segala informasi tentang pergerakan dunia dan perubahannya sengaja ditutup-tutupi untuk meredam aksi pemberontakan. Penipuan-penipuan tersebut didukung oleh surat kabar-surat kabar milik pemerintah Belanda. Anugerah sebagai siswa terbaik di seluruh Hindia juga salah satu dari rangkaian penipuan tersebut. Untuk itu, pribumi yang harus mengusahakan pendidikan ditanah airnya sendiri, seperti yang ditegaskan oleh Ter Haar dalam *Anak Semua Bangsa*.

“Maka jangan harapkan pendidikan modern akan diberikan di negeri-negeri jajahan seperti negeri Tuan ini. Hanya bangsa jajahan sendiri yang tahu kebutuhan negeri dan bangsanya sendiri. Negeri penjajah hanya akan menghisap madu bumi dan tenaga bangsa jajahnya. Ditolak-balik akhirnya kaum terpelajar bangsa jajahan sendiri yang perlu tahu kewajibannya....” (Toer, 2001:90).

Pemberian hak belajar bagi pribumi hanya untuk menyenangkan golongan liberal yang selama ini memperjuangkan nasib Hindia sebagai negeri jajahan di dunia Internasional. Golongan ini yakin hutang pemerintah Belanda pada pribumi Hindia cukup besar sehingga untuk menebus kesalahan adalah dengan memperbaiki taraf hidup masyarakat pribumi. Gerakan yang menuntut perbaikan nasib bagi Hindia dikenal dengan Politik Etis. Dimulai dari pemerataan kesempatan menempuh pendidikan bagi pribumi.



2.4 Ketidakadilan Pemerataan Kerja

Sebagai indikasi dari kebijaksanaan politik rasial pemerintah Belanda, tampak pada terkonsentrasinya golongan masyarakat Eropa (kulit putih) pada jabatan-jabatan tertinggi dalam birokrasi pemerintahan, sedangkan unsur-unsur masyarakat pribumi terkonsentrasikan pada jabatan-jabatan yang lebih rendah. Pembatasan-pembatasan fungsi dalam jabatan-jabatan pemerintahan itu sangat penting untuk menghambat lajunya mobilitas sosial vertikal golongan bumiputera atau golongan masyarakat Timur asing lainnya, demi mengamankan dominasi kaum kulit putih di Hindia Belanda.

Seorang Eropa Totok dapat dipastikan menduduki jabatan lebih tinggi dibanding golongan lainnya, sekalipun dengan golongan Indo Peranakan. Golongan Indo menempati posisi dibawah Totok, seperti pada kutipan berikut dalam *Bumi Manusia*.

Komandan regunya, Kopral Bastiaan Télinga, seorang Indo-Eropa. sekiranya ia bukan Totok, tak bisa tidak ia akan tinggal jadi serdadu klas dua. Serdadu klas dua hanya pangkat untuk Indo dan Pribumi (Toer, 2001:59).

Semua sendi perekonomian pribumi dikuasai oleh Belanda, mulai dari perkebunan, hutan, sawah, ladang. Setiap jengkal tanah di Hindia diakui milik Gubernur. Pribumi yang tinggal di atas tanah Gubernur harus membayar sewa. Perkebunan, sawah, dan ladang dikerjakan oleh pribumi dengan upah yang rendah. Hanya perdagangan yang masih didominasi oleh orang-orang Arab dan Tionghoa. Pekerjaan kasar selalu dibebankan pada pribumi. Pribumi bekerja untuk Belanda sebagai budak, diperas tenaganya untuk memenuhi target Belanda.

Di dalam struktur pemerintahan, pribumi hanya menempati posisi sebagai *jongos* atau petugas kebersihan. Jabatan paling tinggi di lingkungan Pertanian Gubernur untuk pribumi adalah sebagai Jurutulis yang bergelar Sastrotoomo. Jabatan itu diberikan untuk menarik simpati warga di sekitar perkebunan bahwa pemerintah masih peduli pada nasib pribumi. Padahal maksud itu tidak lain supaya masyarakat tidak berontak ketika Gubernur mengambil alih kepemilikan tanah mereka.

Jabatan di atas Jurutulis adalah Sastro Kassier atau Jurubayar. Jabatan sebagai Jurubayar di lingkungan pabrik atau perkebunan merupakan jabatan tertinggi yang diimpikan oleh semua pribumi. Orang-orang pribumi yang bernafsu menduduki jabatan ini rela mengorbankan apa saja. Kehormatan dan harga diri dijual pada Gubernur untuk menarik simpati, tidak lain sebagai penjilat Gubernur. Apapun yang diminta Gubernur sebagai syarat kenaikan pangkat akan diberikan, termasuk menjual anak gadisnya sendiri untuk dijadikan gundik atau nyai oleh Tuan Besar Kuasa. Harta, pangkat dan kehormatan diperoleh dari menjual kehormatan dan harga diri sendiri.

2.5 Ketidakadilan Hukum

Perbedaan perlakuan penguasa kolonial terhadap pribumi juga terjadi di bidang hukum. Setiap perkara yang terjadi selalu diselesaikan menurut hukum Belanda. Dalam mengadili perkara yang melibatkan pribumi dan orang Eropa, hukum Eropa bersikap tidak adil. Pengadilan Putih selalu membela orang-orang sebangsa mereka sendiri, walaupun secara nurani orang itu bersalah. Pribumi

diperlakukan tidak adil sejak perkara muncul samapai pada hasil keputusan sidang. Semuanya hanya untuk menegaskan bahwa hukum ciptaan kolonial hanya untuk memenangkan perkara kolonial, seperti yang dikatakan oleh Nyai Ontosoroh dalam *Bumi Manusia* berikut, “Benar, ini tak lain dari perkara bangsa kulit putih menelan Pribumi...Barangkali ini yang dinamai perkara kolonial—perkara menelan Pribumi bangsa jajahan” (hal.374).

Pengadilan Eropa menyediakan advokat untuk mewakili pribumi mengurus perkaranya di pengadilan. Advokat itu berkebangsaan Eropa, yang hanya bermental sebagai pengabdian uang. Semakin banyak uang yang dikeluarkan oleh pribumi untuk membayarnya, sebesar itulah kejujurannya. Berapapun kekuatannya untuk membela pribumi, tidak akan mampu menghadapi kesewenangan, keperkasaan, dan kedinginan hukum dan keadilan Eropa. Orang Eropa akan kembali berpihak pada hukum Eropa.

Status seorang anak hasil pergundikan menjadi perkara yang umum terjadi, karena berkaitan dengan pembagian harta warisan nantinya. Anak-anak itu jika diakui oleh ayahnya, menjadi bukan pribumi. Tidak diakui, menjadi pribumi artinya: Pribumi sama dengan anak gundik yang tidak diakui oleh sang ayah. Ibunya sendiri tidak berhak atas diri anak-anaknya, sekalipun ia yang telah melahirkan. Anak-anak mereka dibawah perlindungan hukum Eropa dan diakui secara hukum sebagai Indo, bukan pribumi.

Dalam *Jejak Langkah*, diceritakan tentang suka duka perjalanan organisasi di Hindia. Setiap badan organisasi yang didirikan di Hindia harus memiliki badan hukum yang sah dan sudah tercatat dalam arsip Gubernur. Hal itu untuk

memudahkan pemerintah melakukan *monitoring* terhadap setiap bentuk gerakan organisasi. Tumbuhnya organisasi-organisasi baru di Hindia sebagai wujud reaksi dari perkembangan dunia. Di negara-negara lain, organisasi muncul sebagai wadah untuk menyatukan visi dan misi menuju bangsa yang merdeka. Begitu pula yang terjadi di Hindia. Golongan terpelajar pribumi mulai berorganisasi.

Pemerintah Gubernur menjadi khawatir melihat perkembangan organisasi pribumi. Dengan tangan kekuasaan, Gubernur melakukan pengawasan dan menindak atas nama hukum bagi organisasi dan tokoh-tokohnya yang dianggap membahayakan pemerintah Belanda. Minke, seorang pribumi terpelajar, pendiri surat kabar *Medan* dan S.D.I, harus menghadapi ketidakadilan hukum Eropa. Ia dinyatakan berbahaya bagi bangsanya, yang sebenarnya membahayakan kolonial, kemudian menjatuhkan hukuman buangan selama lima tahun di Maluku. Bagi pejabat-pejabat Gubernur, kedudukan sebagai penguasa secara langsung memiliki hak-hak luar biasa (hak *exorbitant*), yang membuat mereka dapat melakukan tindakan sewenang-wenang berdasarkan hukum yang mereka buat sendiri. Hukuman buangan selalu terjadi jika ada pribumi yang berani melawan Gubernur. Orang-orang buangan dijauhkan dari tanah kelahirannya, dari keluarga dan pengikut-pengikut setianya, hanya untuk meredam pemberontakan pribumi.

Hukuman buangan diberlakukan untuk membungkam aksi pemicu perlawanan pribumi. Selama menjalani hukuman, tidak diperkenankan melakukan surat menyurat dengan pihak luar, setiap bentuk komunikasi dengan dunia luar harus diputus. Begitu pula jika ada seorang gadis Pribumi yang berani

menyuarakan semangat nasionalisme, semangat untuk bebas dari penjajah, akan mengalami nasib yang serupa. Bukan dibuang, melainkan dibungkam oleh tali perkawinan. Orang tuanya harus memilih menikahkan anak gadisnya atau menjalani hukuman buangan. Bagi orang tua yang ingin tetap menikmati harta dan kedudukan, maka dipilihlah cara yang pertama. Menikahkan anak gadis berarti telah mengikatnya dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati sebagai seorang istri. Tindakan ini merupakan cara kolonial yang paling ampuh untuk mencegah kebangkitan kaum perempuan.

Ketidakadilan-ketidakadilan yang dilakukan oleh kolonial terhadap pribumi bertujuan untuk mempertahankan keamanan pendudukan Belanda atas Hindia. Semua ketimpangan itu terekam jelas dalam Tetralogi Pulau Buru. Dalam konstruk masyarakat kolonial, semua yang tidak Eropa, diinjak, ditertawakan, dihina, hanya untuk berpamer tentang keunggulan Eropa dan keperkasaan kolonial. Pribumi telah dibuat sedemikian rendahnya oleh orang-orang Eropa, juga oleh pembesar pribumi sendiri. Mereka menganggap seorang pribumi yang mengenakan sepatu sebagai wakil kekuasaan Eropa. Dalam benak mereka sepatu identik dengan peralatan perang penguasa, senyawa dengan senapan dan meriam kompeni.

Bangsa Eropa tidak akan mau mengakui persamaan derajat dengan bangsa kulit berwarna. Mereka tidak mau mengakui kedaulatan dari bangsa kulit berwarna sekalipun secara Internasional diakui semua bangsa sederajat. Mereka menolak berdiri sama tinggi dengan bangsa yang dianggapnya baru maju, apalagi jika kemajuannya itu atas bimbingan Eropa. Kemajuan yang dicapai oleh negeri

jajahan dianggap sebagai hadiah dan itu merupakan kekeliruan terbesar yang dilakukan oleh kolonial. Pribumi tidak boleh sama dengan apalagi lebih dari Eropa. Pribumi harus selalu kalah dan dikalahkan.

BAB III

**MINKE DAN NYAI ONTOSOROH
SEBAGAI SUBJEK ANTIKOLONIAL**